



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Bencana alam hancurkan fasilitas pendidikan: hak pendidikan anak terancam
Tanggal	: Kamis, 04 Desember 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Bencana Alam Hancurkan Fasilitas Pendidikan

Hak Pendidikan Anak Terancam

Bencana alam yang terjadi di Sumatera menjadi perhatian serius. Banyak bangunan rusak, termasuk sekolah. Untuk itu, Pemerintah dinilai perlu melakukan kebijakan agar proses belajar tetap berlangsung.

Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan proses

pemetaan fasilitas pendidikan di wilayah terdampak bencana alam di Sumatera. "Sebagian sudah dimulai untuk tenda belajar darurat," ujar Abdul Mu'ti kepada *Rakyat Merdeka* Rabu (3/12/2025).

Merespons kondisi krisis ini, Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera

mengambil langkah darurat guna memastikan hak pendidikan anak-anak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap terpenuhi.

Di menegaskan, bahwa pemulihuan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan pasca bencana.

"Menyelamatkan tempat belajar sama artinya dengan menyelamatkan kelangsungan

masa depan generasi muda yang terdampak musibah," ungkap Fikri Faqih di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, hak pendidikan anak-anak harus segera terpenuhi. Menurut dia, dengan fasilitas terburuk, proses pembelajaran bisa dilakukan di tenda darurat atau tempat pengungsian.

"Saya yakin yang rusak ribuan dari akumulasi beberapa wilayah. Maka yang dibutuhkan saat ini adalah kelas-kelas darurat," ujar Satriwan Salim kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu (3/12/2025).

Untuk mengetahui pandangan dari Abdul Fikri Faqih dan Satriwan Salim mengenai penanganan di sektor pendidikan pada bencana alam di Sumatera, berikut wawancaranya.

ABDUL FIQRI FAQIH,
Anggota Komisi X DPR

Perlu Langkah Darurat Selamatkan Pendidikan



Bagaimana Anda melihat bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatera?

Bencana alam banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan tiga orang di Pulau Sumatera meninggal dunia dan puluhan ribu sekolah terdampak dengan catatan kerusakan berat mencapai 1.009 sekolah. Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat belajar karena pendidikan itu menjadi tugas kita masa depan anak-anak.

Jumlah sekolah yang rusak sangat banyak, lantas apakah ini bisa segera diperbaiki?

Menanggulangi bencana alam yang sangat besar dan tidak mungkin sepenuhnya terakomodasi oleh anggaran reguler Kemendikdasmen.

Solusi dari Anda?

Kami memerlukan kemitraan terkait untuk segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mengakses dana darurat guna Siaga dan Siaga Darurat (DSDP) untuk penanggulangan bencana. Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup, maka Kemendikdasmen

perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk memprioritaskan hal ini, di sana ada anggaran *recalling* bencana.

Jadi harus berinisiatif ya untuk koordinasi dan berkoordinasi?

Iya, pentingnya sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan tiga Pemerintah Daerah terdampak, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Langkah cepat yang bisa dilakukan seperti apa?

Kami mendorong penyediaan fasilitas sekolah darurat segera, misalnya, mendirikan tenda belajar darurat dengan catatan kondisi psikologis siswa.

Kami mengingatkan, bahwa sebelum mulai proses belajar mengajar, asesmen terhadap trauma siswa harus dilakukan terlebih dahulu.

Selain itu?

Kemendikdasmen juga harus menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana alam dengan catatan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya *trauma healing*. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan pemulihuan psikologis siswa.

Menurut Anda, lembaga mana saja yang dapat dilibatkan dalam pemulihuan bencana alam ini, khususnya di sektor pendidikan?

Kemendikdasmen secara geografis ada potensi yang bisa terjadi bencana yang berbeda-beda dan beragam. Serta hanya sekolah yang menjadi kebijakan kebijakan yang dibutuhkan. Kami sih berharap Pemerintah sudah punya pemetaan terhadap bencana atau berpotensi bencana dan bencana-cana yang ada. Setelah pemetaan itu dilakukan, Pemerintah harus punya data di sini.

Bagaimana Anda melihat bencana alam di Sumatera dan dampaknya ke sektor pendidikan?

Iya, mengingat jaringan internet dan fasilitas penunjang di lokasi bencana kemungkinan besar lumpuh. Pemerintah perlu mempersiapkan alternatif modul fisik yang relevan bagi siswa.

PJJ ini bisa menjadi solusi sementara. Mengingat belum ada fasilitas internet yang memadai. Pemerintah perlu mempersiapkan modul modul fisik yang relevan.

Bagaimana pandangan Anda dengan bencana alam di Sumatera dan dampaknya ke sektor pendidikan?

Indonesia juga secara geografis ada potensi yang bisa terjadi bencana yang berbeda-beda dan beragam. Serta hanya sekolah yang menjadi kebijakan kebijakan yang dibutuhkan. Kami sih berharap Pemerintah sudah punya pemetaan terhadap bencana atau berpotensi bencana dan bencana-cana yang ada. Setelah pemetaan itu dilakukan, Pemerintah harus punya data di sini.

Untuk apa saja itu?

Misalkan jika terkait sebagai setelah kebijakan, apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah di setiap wilayah di Indonesia ketika terjadi bencana alam. Karena ini bukan kali pertama terjadi. Data data itu semua seharusnya sudah ada.

Apakah yang harus diperlukan?

Pertama, berapa jumlah sekolah.

Saya yakin ribuan sekolah yang terdampak bencana alam yang dibutuhkan kelas-kelas darurat. Sertai tenda atau bantuan sementara, walaupun kondisinya darurat. Setelah dipetakan wilayah-wilayah mana saja yang

terkena bencana. Jangan sampai, titik titik dibuka untuk tenda darurat pun belum jadi, anak-anak di dalam tempat yang juga berpotensi terjadi bencana longsor atau banjir.

Kapan dari anggarannya bagaimana menurut Anda?

Harus ada relokasi anggaran di Kemendikdasmen, di Kementerian Agama, termasuk di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan di lembaga terkait. Kami berpikirnya, bagaimana anak-anak yang selamat bisa mendapatkan hak haknya di dalam pendidikan.

Untuk bangunan sekolah, apakah ini harus menjadi prioritas?

Revitalisasi setelah terjadinya bencana seperti bangunan sekolah itu wajib. Misalkan penganggaran yang ada untuknya tidak cukup, maka perlu dilakukan pemulihuan dan diberikan hak-hak penitipan mereka di tenda-tenda darurat.

Bisa juga berkolaborasi dengan mahasiswa mahasiswa kependidikan. Sehingga mahasiswa tersebut bisa menjadi tenaga pendidikan darurat juga.

Selain itu, apalagi?

Nah harus dilakukan juga soal kebutuhan untuk belajarnya. Misalkan alat tulis, papan tulis, buku, baju, sepatu dan tas. Karena semua itu pastinya sudah habis. Ini harus segera dilakukan inventarisasi dan selanjutnya didistribusikan.

Lantas, apakah proses pembela jaran bisa berjalan normal atau harus ada kebijakan khusus?

Minggu minggu ini di berbagai daerah sedang dilakukan *Assessment* atau penilaian. Untuk itu, anggaran yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan setiap setiap. Jadi, Kemendikdasmen harus memberikan fleksibilitas atau kelengkapan sehingga anak-anak tidak harus melakukan ujian sekarang ini.

Ada usulan dari Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih agar dilakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di seluruh wilayah?

Pertanyaannya adalah, apakah listrik dan internetnya ada. Apakah gawainya mereka ada. Karena kalau PJJ, utamanya adalah listrik, internet dan gawai. Misalkan di wilayah-wilayah yang juga susah saat ini. Kita pikir itu tidak akan efektif. Orang tuanya boro-boro beri bantuan PJJ, mereka juga berpikir keselamatan mereka.

SATRIWAN SALIM,
Koordinator Nasional P2G

Segea Dibangun Kelas-kelas Darurat



Bagaimana Anda melihat bencana alam di Sumatera dan dampaknya ke sektor pendidikan?

Indonesia juga secara geografis ada potensi yang bisa terjadi bencana yang berbeda-beda dan beragam. Serta hanya sekolah yang menjadi kebijakan kebijakan yang dibutuhkan. Kami sih berharap Pemerintah sudah punya pemetaan terhadap bencana atau berpotensi bencana dan bencana-cana yang ada. Setelah pemetaan itu dilakukan, Pemerintah harus punya data di sini.

Untuk apa saja itu?

Misalkan jika terkait sebagai setelah kebijakan, apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah di setiap wilayah di Indonesia ketika terjadi bencana alam. Karena ini bukan kali pertama terjadi. Data data itu semua seharusnya sudah ada.

Apakah yang harus diperlukan?

Pertama, berapa jumlah sekolah.

Saya yakin ribuan sekolah yang terdampak bencana alam yang dibutuhkan kelas-kelas darurat. Sertai tenda atau bantuan sementara, walaupun kondisinya darurat. Setelah dipetakan wilayah-wilayah mana saja yang